

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial tahun 2021 – 2023 Kabupaten Subang. Seperti diketahui bahwa Rencana Strategis Perubahan ini disusun dalam rangka menyesuaikan perubahan arah Kebijakan Pemerintah daerah atas Kondisi keuangan yang mengalami penurunan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian target dan sasaran kinerja perangkat Daerah sesuai skla prioritas penanganan. Perubahan ini juga merupakan upaya penyesuaian terhadap beberapa perubahan regulasi baru baik dilingkungan Kabupaten Subang maupun Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Subang, sesuai dengan fungsi dan tugasnya, turut bertanggungjawab untuk mensukseskan hal tersebut, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial tahun 2021 – 2023 Kabupaten Subang untuk tiga tahun kedepan.

Semoga dengan tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial tahun 2021 – 2023 ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Subang umumnya, serta bidang kesejahteraan sosial khususnya. Kami menyadari bahwa penyusunan rencana ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun dengan tekad, semangat serta mengharap pertolongan dari Yang Maha Kuasa kiranya segala kendala dapat teratasi.

Terima kasih.

Subang,  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Subang,  
  
**Drs. DEDEN HENDRIANA, M.Pd**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19650423 199103 1 006

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1      Latar Belakang .....	1
1.2      Landasan Hukum .....	3
1.3      Maksud Dan Tujuan .....	6
1.4      Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG .....</b>	<b>9</b>
2.1      Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Subang .....	9
2.2      Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Subang .....	15
2.3      Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Subang .....	18
2.4      Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Subang .....	22
<b>BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG .....</b>	<b>25</b>
3.1      Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Subang .....	25
3.2      Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	27
3.3      Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	29
3.4      Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	29
3.5      Penentuan isu-isu strategis .....	32
<b>BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB V      STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VII      KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB VIII      PENUTUP .....</b>	<b>75</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis atau yang lebih sering disebut RENSTRA adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan dokumen renstra dibuat sesuai amanat Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Gambar 1.1

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah



Dinas Sosial Kabupaten Subang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang menjadi salah satu perangkat daerah yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Subang dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi tentang visi misi dan program kerja dari Kepala Daerah. Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan rancangan yang berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023. Rancangan akhir Renstra selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2021-2023 disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan perubahan atas RENSTRA Tahun 2018-2023 sebagai upaya penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten

Subang yang juga mengalami perubahan. Dokumen ini menyampaikan informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama kurun waktu tersebut. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang timbul selama kurun waktu 2 tahun, kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia serta kebijakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat selama 3 tahun mendatang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya RENSTRA perubahan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang No. 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
12. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
13. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomo 4663)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 -2023.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 - 2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023
27. Peraturan Bupati Subang Nomor 78 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Subang
28. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas
29. Peraturan Bupati Subang Nomor 58 Tahun 2020 Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang adalah sebagai pedoman dan arah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan sosial dimana sesuai amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib daerah. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Subang ini juga disusun untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Subang.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh dinas sosial untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten di bidang urusan sosial.



2. Menjadi acuan kerja bagi dinas sosial serta para pihak terkait dalam upaya mewujudkan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Menjadi acuan dalam melakukan penilaian kinerja

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan Renstra Perubahan Dinas Sosial periode 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang penyusunan renstra dinas sosial Kabupaten Subang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Subang
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Subang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Subang
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas sosial Kabupaten Subang

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG**

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas sosial Kabupaten Subang

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Subang

#### **BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA**

##### **PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Sosial kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32) dan Peraturan Bupati Subang Nomor 58 Tahun 2020 (perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2019) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Sosial ;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas  
mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang sosial serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati, dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang Sosial ;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Sosial ;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang Sosial ;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas ;
- e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas Sosial ;
- f. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Bupati.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat ;
- b. Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah ;
- c. Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas ;
- d. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dinas;
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah;
- f. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ;
- h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas ;

- i. Pengelolaan naskah dinas ;
- j. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

### 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kegiatan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial ;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Penyelenggaraan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
- f. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial;
- g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;

- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana ;
- c. Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kegiatan Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Sosial ;
- b. Pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bidang Pemberdayaan Sosial ;
- c. Pengelolaan Data dan Informasi bidang Pemberdayaan Sosial ;
- d. Penyelenggaraan koordinasi Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Sosial ;
- e. Penyelenggaraan bimbingan teknis kepada kelompok sasaran dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial ;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada kelompok sasaran ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang pemberdayaan sosial ;
- h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial ;
- i. Penyelenggaraan bimbingan teknis pendamping sosial dibidang pemberdayaan sosial ;

- j. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
- k. Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang pemberdayaan sosial ;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin ;
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Adat Terpencil ;
- c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

## 2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dan Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

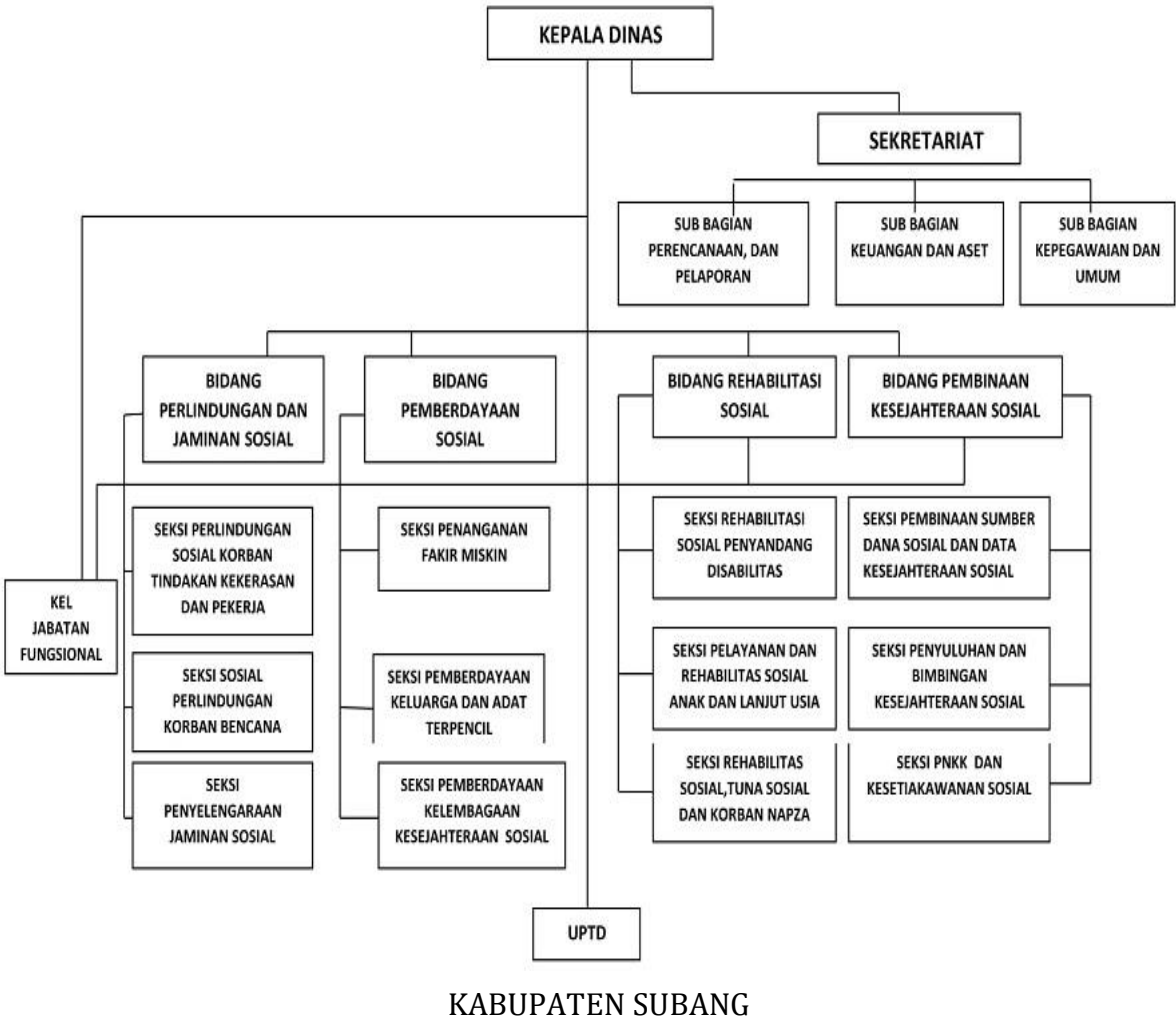
- a. Penyusunan Program Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial ;
- b. Pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bidang Rehabilitasi Sosial ;
- c. Pengelolaan Data dan Informasi bidang Rehabilitasi Sosial ;
- d. Penyelenggaraan koordinasi Penyelenggaraan Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Penyelenggaraan bimbingan teknis kepada kelompok sasaran dan supervisi dibidang Rehabilitasi Sosial ;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada kelompok sasaran ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang Rehabilitasi Sosial;
- h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial ;

- i. Penyelenggaraan bimbingan teknis pendamping sosial dibidang Rehabilitasi Sosial ;
- j. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;
- k. Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ;
- b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial.

Gambar 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL





2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Subang memiliki Sumber daya manusia sebanyak 51 orang dan aset. Sumber daya manusia / aparatur yang dimiliki dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Sumber daya Manusia

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Subang**  
**berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Eselon			
	I	II	III	IV
	-	1	5	15

**Tabel 2.2**  
**Pengawai Dinas Sosial Kabupaten Subang Berdasarkan**  
**Gol/Ruang**

No	Gol/Ruang	Jumlah
1	IV.e	-
2	IV.d	-
3	IV.c	1
4	IV.b	1
5	IV.a	6
1	III.d	10
2	III.c	5
3	III.b	4
4	III.a	5
1	II.d	7
2	II.c	5
3	II.b	6

4	II.a	1
1	I.d	-
2	I.c	-
3	I.b	-
4	I.a	-
JUMLAH		51

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	30
2	Wanita	21

**Tabel 2.4**  
**Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Subang**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Pendidikan							Jumlah
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
	-	7	20	6	18	-	-	51

2. Sumber daya asset/modal
- Sarana dan prasarana dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Subang yang ada mencakup gedung perkantoran dengan dilengkapi peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana kendaraan darat berupa roda dua dan roda empat untuk mendukung aktivitas kegiatan rutin yang harus dilaksanakan.

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Subang**

No	Asset	Jumlah	Nominal (Ribuan)
1	Tanah Taman makam Pahlawan	8.084m2	404.200
2	Tanah bangunan Kantor	3.460m2	3.460.000
3	Kendaraan Operasional (Roda 4 dan roda 2)	36 Buah	
4	Barang Inventaris	236 barang	3.373.740,89
5	Gedung kantor	17 Bangunan	5.605.818,25

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS SOSIAL  
Kabupaten Subang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSPK	Targ et IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan penanganan/pelayanan PMKS				60	65	60	65	1	1
2	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial				30	35	30	35	1	1
3	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Kab. Subang				67,67	71,00	60,01		60,61	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kab. Subang				B (88.30)	B (88.30)	B (86.19)	B (86.22)	B (86.19)	B (86.22)

Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINAS SOSIAL

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.975.550.000	5.661.985.000	6.511.410.265	5.486.400.255	51,61	54,67	-6,24	-3,14
Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.194.952.000	66.820.000	1.124.040.780	814.996.737	10,37	10,39	-0,06	-0,04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.184.900.000	255.300.000	978.734.320	242.054.250	5,27	6,84	-2,28	0,18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.000.000	23.000.000	16.800.000	22.755.000	0,93	0,99	0,28	0,35

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.435.400	41.040.000	58.060.400	38.040.000	7,77	8,81	-2,03	-1,72
Program Pembangunan Gedung Kantor	100.000.000	-	99.265.000	-	0,99	1,00	-1,00	-1,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesos. Lainnya	2.083.332.600	1.684.100.000	2.050.966.863	1.678.008.000	4,94	4,97	0,08	0,01
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.008.725.000	1.261.200.000	967.016.995	1.170.866.268	6,19	6,37	-1,62	-0,85
Program Pembinaan Anak Terlantar	39.950.000	2.250.000	39.325.000	2.250.000	0,98	1,00	-0,94	-0,94
Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	473.310.000	17.150.000	391.252.000	16.882.000	2,62	2,97	-2,69	-2,66

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	21.890.000	-	21.201.363	-	0,97	1,00	-1,00	-1,00
Program Pemberdayan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	760.905.000	1.511.125.000	740.532.544	1.500.548.000	9,61	9,32	6,02	5,52
Program Sosial Kemasyarakatan	25.150.000	-	24.215.000	-	0,96	1,00	-1,00	-1,00

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dilihat dari pencapaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2019 dan 2020 pada table 2.6 realisasi dan target berbanding lurus artinya realisasi sudah tercapai memenuhi target yang ditentukan walaupun anggaran sangat ditekan tapi target kinerja bisa tercapai, hal ini dikarenakan konsistensi pemerintah terhadap jumlah target kinerja dengan anggaran yang minim. Target kinerja yang digunakan adalah target dalam setiap tahunnya, sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan di Kabupaten Subang masih tinggi dan jauh dari capaian per tahunnya. Masih diperlukan dukungan anggaran setiap tahun untuk meningkatkan target pelayanan kepada PMKS sehingga percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Subang bisa dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan tabel 2.7 dapat diketahui terjadi penurunan realisasi anggaran hingga minus 6,24% pada anggaran tahun 2020 dan minus 3,14% pada realisasi tahun 2020 hal ini disebabkan karena terjadinya bencana nasional yaitu adanya wabah Corona Virus Disease 2019 atau disebut Covid -19. Akibat adanya Pandemi virus covid-19 yang semakin meluas maka sebagian besar anggaran dialihkan/ digeser untuk percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Inpres No. 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2020 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang percepatan dan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Relokasi atau refocusing anggaran ini terfokus pada belanja-belanja penunjang yang terdapat di Program Pelayanan Administrasi Umum sehingga tidak mengganggu target pencapaian kinerja.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Pada umumnya Renstra Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi mempunyai fokus sasaran yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan upaya penanganan PMKS. Penyelenggaraan



kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Subang ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial kabupaten Subang tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial nomor 9 Tahun 2018, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang; seperti jalan tol telah mendorong Kabupaten Subang mulai berkembang menjadi kota industri dan komersial lainnya, terutama di bagian utara. Pemanfaatan lahan untuk industri dan permukiman adalah perubahan terbesar di Kabupaten Subang. Kecenderungan kota yang mengalami pergeseran fungsi menjadi kota komersial umumnya ditandai dengan adanya

peningkatan eksploitasi lahan non terbangun dengan menggeser aktivitas primer yang ada di dalamnya.

Pembangunan Proyek Strategis nasional pelabuhan patimban di Kecamatan Pusakanagara yang berimbas pada 3 Kecamatan lainnya yaitu Pusakajaya, Legonkulon, Pamanukan menjadi tantangan dinas sosial dalam meningkatkan pelayanannya. Pembangunan pelabuhan patimban akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang awalnya menjadi petani, petambak, buruh tani dan nelayan karena tempat kerja mereka hilang akibat pembangunan pelabuhan tersebut. Perilaku sosial masyarakat juga akan berubah dikarenakan banyaknya pendatang dari luar wilayah Subang.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Subang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
Dinas Sosial Kabupaten Subang

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari pelayanan dinas sosial, masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan masalah di Kabupaten Subang. Sesuai permensos No 8 Tahun 2012 ada 26 Jenis PMKS dan 12 PSKS.

Tabel 3.1. a

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2018

NO	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	50
3	Anak berhadapan dengan hukum	45
4	Anak jalanan	15
5	Anak yang Kedisabilitas (ADK)	3.423
6	Anak korban tindak kekerasan	8
7	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	20
8	Lanjut usia terlantar	23.155
9	Penyandang disabilitas	9.236
10	Tuna susila	824
11	Gelandangan	50
12	Pengemis	25
13	Pemulung	0
14	Kelompok minoritas	5.350
15	Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLK)	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.766
17	Korban Penyalahgunaan napza	141
18	Korban Trafficking	5
19	Korban tindak kekerasan	5
20	Pekerja migrab bermasalah socil (PMBS)	50
21	Korban bencana alam	22.984
22	Korban bencana sosial	40
23	Perempuan rwan sosial ekonomi	657
24	Fakir miskin	644.496
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	0
26	Komunitas Adat terpencil	0

Dari 26 Jenis PMKS diatas anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan, penyandang disabilitas terlantar dan korban bencana sosial dan bencana alam menjadi sasaran dari standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya.

**Tabel 3.1. b**  
**Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2018**

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN	JUMLAH
1	Pekerja sosial profesional	2
2	Pekerja sosial masyarakat	20
3	Taruna siaga bencana (TAGANA)	110
4	Lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	15
5	Karang taruna	253
6	Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LKS)	1
7	Keluarga pionir	0
8	WKSBM	2
9	Wanita pemimpinkesejahteraan sosial	0
10	Penyuluhan sosial	273
11	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	30
12	Dunia usaha	2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinas sosial Kabupaten Subang juga memiliki beberapa masalah diantaranya:

1. Data PMKS dan PSKS yang belum semua terupdate dari seluruh wilayah desa/kecamatan.
2. Belum optimalnya pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama lembaga kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.
3. Kurangnya factor pendukung diantaranya anggaran, ketersediaan SDM dan Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan penanganan penduduk miskin.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang

Mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 adalah:

***“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan berkarakter”***

Visi tersebut memiliki makna yaitu:

- Bersih** : Pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, professional dan proposional dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, serta pemerintahan dan masyarakat yang religious;
- Maju** : Masyarakat Subang meningkat dalam segi kualitas hidup, menikmati standar hidup layak, melalui pembangunan yang adil dan merata;
- Sejahtera** : Masyarakat Subang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat kesehatan yang baik, kehidupan yang aman dan nyaman, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.
- Berkarakter** : Masyarakat Subang yang memiliki ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan, ditunjang dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah diatas maka disusunlah lima misi yang di kenal dengan **“Panca Jimat – Akur untuk Subang Jawara”**, JAWARA merupakan singkatan dari ***Jaya Istimewa dan Sejahtera***.

- Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat;
- Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan;
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja;
- Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal;

Misi 5 : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup

Dari visi dan misi tersebut diluncurkanlah 9 program unggulan yang disebut “Subang JAWARA” terdiri dari:

1. Jawara Nata (Tata ruang, Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur serta perhubungan)
2. Jawara Niaga (Perindustrian, Perdagangan dan KUKM)
3. Jawara Wisata (Pariwisata dan seni serta Budaya)
4. Jawara Raga (Kependudukan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesehatan)
5. Jawara Daya (Pendidikan dan Keagamaan)
6. Jawara Miara (Peternakan dan Perikanan)
7. Jawara Pakaya (Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan)
8. Jawara Raksa (Lingkungan Hidup)
9. Jawara Nagara (Reformasi Birokrasi dan Hukum)

Dinas Sosial Masuk dalam Misi Ke 4 dengan Program Jawara Raga, sasaran dan tujuannya yaitu peningkatan jumlah penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Faktor penghambat pada dinas sosial yang bisa mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Belum memadainya sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dalam mengembangkan pelayanan penanganan terhadap PMKS;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap PMKS.
4. Belum optimalnya pelayanan oleh PSKS
5. Masih minim nya PSKS yang ada yang mampu memberikan pelayanan kepada PMKS
6. Belum tersedianya shelter/penampungan bagi PMKS
7. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi industri dan perumahan meningkatkan jumlah PMKS

Factor pendorong yang dimiliki oleh dinas sosial adalah

1. Telah tersedianya Perda percepatan penanganan Fakir Miskin
2. Tersedianya Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak hak Penyandang Disabilitas
3. Mitra kerja dinas sosial seperti TKSK, Pendamping PKH dan TAGANA yang siap membantu dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat**

Sasaran dinas sosial Provinsi Jawa Barat pada renstra dinas sosial provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah:

1. Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat;
2. Meningkatnya pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial
4. Terwujudnya provinsi Jawa Barat tangguh bencana
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Dasar yang Transparan dan Akuntabel.

Pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Barat tidak lepas dari dukungan pelayanan kesejahteraan sosial dari Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Kabupaten Subang telah melakukan tahapan sinkronisasi dengan Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan kemampuan Kabupaten Subang dalam mengelola anggaran untuk Program/Kegiatan agar terwujud sinergitas pembangunan berkelanjutan tahun 2018-2023.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah Kabupaten Subang**

Telaahan terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pelayanan dinas sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial :

1. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi industri di Kabupaten Subang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat terdampak yang semula bergantung pada pengolahan lahan pertanian.

Penggunaan lahan di Kabupaten Subang terbagi menjadi dua kelompok, tanah sawah dan tanah kering. Tanah sawah terdiri dari sawah pengairan teknis, dan sawah tadah hujan. Sesuai karakteristik daerah dari luas total wilayah Kabupaten Subang sebesar 2.051,76

km<sup>2</sup>, tata guna lahan di Kabupaten Subang didominasi oleh tanah pengairan teknis sawah seluas 74.178,97 Ha.

2. Letak geografis kabupaten Subang yang terdiri dari lautan, dataran tinggi dan dataran rendah mengakibatkan rawan terjadinya bencana yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang terdampak. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (manmade disaster). Dalam Perencanaan Tata Ruang yang bersifat makro seperti RTRW Kabupaten Subang, kategori kebencanaan yang dianalisa secara makro adalah bencana yang terkait dengan kondisi fisik kawasan, yaitu berhubungan dengan bahaya alam (natural hazards) yang dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).

- a. Potensi Bencana Banjir dan Abrasi Pantai

Bencana banjir dapat terjadi di kawasan yang memiliki topografi dan bentuk lahan berupa cekungan dengan permeabilitas tanah yang buruk sehingga tidak ada alir bagi resapan maupun limpahan air hujan (menimbulkan genangan). Di Kabupaten Subang pada musim penghujan menggenangi wilayah Kec. Pamanukan, Legon Kulon, dan Kecamatan Pusakanegara Kec. Blanakan, Patokbeusi, dan Ciasem. Bila hujan besar dan menerus, wilayah DAS Sungai Cipunagara yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Subang memiliki potensi banjir yang dapat menggenangi dataran rendah. Untuk daerah rawan bencana banjir rob yang ada di Kabupaten Subang hanya terdapat di satu kecamatan saja yaitu di Kecamatan Legonkulon. Sedangkan untuk daerah rawan bencana abrasi pantai terdapat di Kecamatan Legonkulon dan Kecamatan Pusakanegara.

- b. Gempa Tektonik

Gempa bumi tektonik yaitu gempa bumi yang terjadi karena adanya tenaga tektonik yang disebabkan oleh pergeseran yang tiba-tiba dalam bumi dan berhubungan erat dengan gejala pembentukan pegunungan. Pergerakan kulit bumi ini berhubungan dengan pergerakan lempeng-lempeng bumi yang terus menerus akibat gaya-gaya tektonik global. Daerah yang berpotensi terkena bencana gempa bumi terdapat di Kecamatan



Tanjungsang. Sumber gempa bumi tektonik adalah pergerakan tiba-tiba pada bidang patahan aktif sebagai proses untuk melepaskan energi kinetik regangan yang terkumpul secara perlahan-lahan dalam jangka waktu lama.

c. Zona Kerentanan Pergerakan Tanah

Zona Kerentanan Pergerakan Tanah adalah daerah-daerah yang kondisi tanahnya sangat rentan ( tidak stabil ) terhadap proses alam seperti erosi, longsor dan gerakan tanah. Gerakan tanah diakibatkan oleh struktur (jenis) tanah serta faktor kelerengan lahan. Bencana tanah longsor di Indonesia banyak terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan lereng tinggi. Bencana ini umumnya terjadi pada saat curah hujan tinggi. Di Kabupaten Subang, daerah yang termasuk dalam zona kerentanan tanah adalah di Kecamatan Tanjungsang, Kecamatan Cisalak, Kecamatan Cijambe, Kecamatan Jalancagak, dan Kecamatan Subang.

d. Bencana Letusan Gunung Berapi

Potensi bencana alam berupa letusan gunung berapi di Kabupaten Subang ini berada pada daerah bagian Selatan yang merupakan kawasan Gunung Tangkuban Perahu. Daerah yang rawan terhadap letusan gunung berapi di Kabupaten Subang ini meliputi Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Ciater, dan Kecamatan Jalancagak.

3. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,07% menjadi salah satu faktor peralihan fungsi lahan menjadi pemukiman, ditandai dengan berjamurnya lahan-lahan pertanian yang beralih menjadi perumahan-perumahan.

Implikasi RTRW/KLHS terhadap pelayanan dinas sosial Kabupaten Subang adalah:

1. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi industri dan pelabuhan di Kabupaten Subang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat terdampak yang semula bergantung pada pengolahan lahan pertanian selanjutnya tidak memiliki pekerjaan.
2. Letak geografis kabupaten Subang yang terdiri dari lautan, dataran tinggi dan dataran rendah mengakibatkan rawan terjadinya bencana yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang terdampak.
3. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,07% menjadi salah satu faktor peralihan fungsi lahan menjadi

pemukiman, ditandai dengan menjamurnya lahan-lahan pertanian yang beralih menjadi perumahan-perumahan.

Dari uraian implikasi diatas akan mempengaruhi peningkatan jumlah PMKS di Kabupaten Subang.

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Potensi yang belum tergali/dimanfaatkan oleh Kabupaten Subang.
2. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Subang.
3. Dinamika yang berkembang secara internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Subang.
4. Kebijakan pembangunan daerah sekitar di Kabupaten Subang yang mempengaruhi pembangunan.
5. Isu strategis dari kebijakan pembangunan di Kabupaten Subang yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Subang.
6. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.

Isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas sosial Kabupaten Subang sesuai dengan pelayanan kepada masyarakat adalah:

1. Peningkatan Jumlah PMKS di Kabupaten Subang
2. Sarana dan prasarana pelayanan bagi PMKS;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi PMKS;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan PSKS;

Langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi isu strategis tersebut adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan penanganan PMKS
2. Menciptakan keterpaduan program kegiatan penanganan PMKS
3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana dinas sosial yang layak dalam melaksanakan pelayanan kepada PMKS.
4. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM baik internal dinas sosial maupun tenaga kesejahteraan sosial untuk menunjang pelayanan PMKS.

**Tabel 3.3**  
**Pemetaan Permasalahan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Subang	masih belum optimalnya penanganan PMKS	<div>1. Masih kurangnya SDM dan tenaga kesejahteraan sosial yang menangani PMKS</div> <div>2. Belum tersedianya shelter/penampungan bagi PMKS</div> <div>3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait yang sama-sama menangani PMKS</div> <div>4. Masih minimnya sarana dan prasaranan pelayanan kepada PMKS</div> <div>5. Belum optimalnya pelayanan oleh PSKS terhadap PMKS</div> <div>6. Masih minimnya PSKS di Kabupaten Subang</div> <div>7. Peralihan fungsi lahan mengakibatkan rentannya sosial ekonomi masyarakat terdampak sehingga meningkatkan jumlah PMKS</div>

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Subang**

Dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Subang tahun 2018 – 2023 ***"Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan berkarakter"*** dan mengacu pada misi ke empat yaitu ***"Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal"*** maka dinas sosial Kabupaten Subang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka menengah yang akan dilaksanakan tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	25	35	50
3			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan/Pelayanan PPKS	28,22	29,15	30,24
4			Persentase Penduduk Miskin Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	14,15	14,73	15,36
5	Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Kab. Subang	BB (76,01)	A (80,50)	A (84,00)
6			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kab. Subang	B 83,32	B (84,29)	B (85,6)

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dinas sosial Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan sosial pada tahun 2018 – 2023 adalah:

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI</b>	<b>Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter</b>		
<b>MISI</b>	<i><b>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan dan Kelautan, serta Penggalian Potensi berbasis Budaya dan Kearifan lokal</b></i>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<b>Terwujudnya Kesejahteraan Sosial</b>	Meningkatnya Penanganan atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial	1. Peningkatan pelayanan bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, pengemis dan gelandangan terlantar (SPM) bidang sosial
			2. Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial
		2. Meningkatkan upaya perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial

			2. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial
		3. Mensinergikan upaya penanganan fakir miskin	1. Peningkatan pendampingan kegiatan-kegiatan kementerian
		4. Meningkatkan strategi pengurangan resiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana	1. Penyediaan Bufferstock kebencanaan
			2. Peningkatan pelayanan kepada korban bencana
	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Mengakomodir dan melakukan pendataan PSKS yang ada di masyarakat
			2. Meningkatkan Pemberdayaan PSKS
			3. Peningkatan Jumlah pelayanan Puskesmas
<b>Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan</b>	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Kabupaten Subang	1. Melaksanakan Transparansi Anggaran
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kab. Subang	1. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maka disusun program dan kegiatan. Rencana Program Kegiatan dan pendanaan tersaji untuk periode 2 (dua) tahun.



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Subang  
Tahun 2019 – 2020

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2019			2020		
						Target	Realisasi Target	Rp	Target	Realisasi Target	Rp
Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan											
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP	Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Perkantoran	Persen		100	89,64	1.194.952.000	100	100	866.820.000

Penyediaan Jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah rek telepon, air dan listrik	Rekening	5 rek listrik, 1 rek PAM 2 telp dan 5 internet, (pemeliharaa n instalasi listrik)	5 rek listrik, 1 rek PAM 2 telp dan 5 internet,	81.000.000	9 rekening (jasa telekomunika si2 Rek, Jasa Listrik 5 Rek, dan 3 Rek Internet dan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air)	9 rekening (jasa telekomunikas i2 Rek, Jasa Listrik 5 Rek, dan 3 Rek Internet	97.764.000
			service39 unit laptop/PC, printer 25 unit, 15 unit AC	service39 unit laptop/PC, printer 25 unit, 15 unit AC	25.000.000	39 unit komputer/lap top, 23 unit printer, 15 unit AC, dan 1 unit sound system	39 unit komputer/lapt op, 23 unit printer, 15 unit AC, dan 1 unit sound system	23.400.000
			asuransi dan perizinan kendaraan roda 4 dan roda 2 (13 unit dan 24 unit)	asuransi dan perizinan kendaraan roda 4 dan roda 2 (13 unit dan 24 unit)	55.000.000	14 unit kendaraan roda 4 dan 24 unit kendaraan roda 2	14 unit kendaraan roda 4 dan 24 unit kendaraan roda 2	20.500.000

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	Orang	8 Orang	8 Orang	63.600.000	8 orang	63.600.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	54 ATK Rutin dan 23 Kegiatan	54 ATK Rutin dan 23 Kegiatan	180.000.000	57 ATK Rutin, 23 Kegiatan	175.024.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	7 jenis barang cetakan, 20.125 lembar fotocopy dan 20 spanduk	8 jenis barang cetakan, 16.050 lembar fotocopy dan 25 spanduk dan 5 buah banner	30.000.000	11 Jenis Barang Cetakan, 20 buah Spanduk dan Photo copy	25.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik	Jenis	6 komponen listrik	6 komponen listrik	4.000.000	8 jenis komponen listrik	4.000.000

		Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah tangga	Jenis	19 jenis peralatan rumah tangga dan bahanpembersih serta isi ulang gas	19 jenis peralatan rumah tangga dan bahanpembersih serta isi ulang gas	6.500.000	22 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih, serta isi ulang gas	22 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih, serta isi ulang gas	16.486.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Eksemplar	4 jenis koran	4 jenis koran	15.000.000	5 jenis surat kabar perhari setahun	5 jenis surat kabar perhari setahun	15.000.000
	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah makanan dan minuman	Dus	6571 Dus makan dan 8001 dus snack	6571 Dus makan dan 8001 dus snack	285.265.000	Makan 2.182 Dus dan Snack 2.126 Dus	Makan 2.182 Dus dan Snack 2.126 Dus	108.260.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas	Perjalanan	150 kali	150 kali	449.587.000	1198 kali	1198 kali	317.786.000

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Persen		103,39	1.220.900.000	100	301.300.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	9 jenis perlengkapan kantor	9 jenis perlengkapan kantor	82.100.000	2 jenis perlengkapan kantor	2 jenis perlengkapan kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung Kantor	Jenis	AC, Vacuum Cleaner, Sound System, Pompa Air, Genset. Torn, tangga lipat, mesin absen	5 jenis peralatan	202.800.000	0	0
Pengadaan Mebeuler	Jumlah jenis pengadaan mebeleur	Jenis	3 jenis meubeler	3 jenis meubeler	20.000.000	2 jenis perlengkapan kantor	2 jenis perlengkapan kantor

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	Jenis	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok	25.000.000	6 unit bangunan gedung kantor dan pagar tembok	6 unit bangunan gedung kantor dan pagar tembok	55.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Jenis	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok	8 unit kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 24 kendaraan	8 unit kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 24 kendaraan	15 unit kendaraan dinas operasional roda 4 dan 24 unit kendaraan roda 2	83.250.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala TMP	Jumlah Jenis Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jenis	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok	3 jenis tugu abadi dan pemeliharaan	3 jenis pemeliharaan	2 jenis (pemeliharaan taman dan pemasangan paving block)	90.000.000
	Rehabilitasi Gedung Kantor	Luas rehab gedung kantor	M <sup>2</sup>	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok	3 rehabilitasi berat	1 unit gedung kantor	0	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang disiplin	Persen	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok	6 bangunan gedung kantor dan pagar tembok		100	100	23.000.000

	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	60 potong	60 potong	60 potong	18.000.000	70 potong pakaian Olahraga	70 potong pakaian Olahraga	23.000.000
	Program Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah dokumen DED	Buku	100	100		100.000.000	0	-	-
	Pembuatan Detail Engineering Desain (DED)	Jumlah Buku DED	Buku	0	0	16 buku	100.000.000	0	0	

<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Nilai evaluasi akip 2. Persentase kegiatan yg mencapai target kinerja 3. Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat atas pengelolaan Keuangan dan barang daerah	Persen								
				100	100	64.435.400	100	100	100	41.040.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Buku	1 paket sebanyak 5 buku	1 paket sebanyak 5 buku	3.000.000	25 Buku	25 Buku			



Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah buku laporan Keuangan Semesteran	Buku	1 paket sebanyak 5 buku	1 paket sebanyak 5 buku	4.000.000	4 Buku	4 Buku	3.700.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah buku laporan Keuangan akhir tahun	Buku	1 paket sebanyak 5 buku	1 paket sebanyak 5 buku	4.000.000	4 Buku	4 Buku	2.200.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah buku Laporan Monitoring evaluasi dan pelaporan	Buku	14 Kegiatan di Desa dan Kecamatan	5 buku	4.000.000	4 Buku	4 Buku	365.000
Penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD	Jumlah buku Renja, RKA dan DPA SKPD	Buku	1 Dokumen Rencana Kerja 2019, 1 Dokumen RKA 2019, RKPA, 1 Dokumen DPA, DPPA 2019,	100 buku	31.935.400	50 Buku (Renja, RKA, DPA dan DPPA)	50 Buku (Renja, RKA, DPA dan DPPA)	16.125.000

		Jumlah Buku laporan aset semester I dan II	Buku	2paket sebanyak 10 buku	5 buku	5 buku	3.500.000	4 Buku	4 Buku	3.700.000
		Penyusunan Laporan BMD semesteran								
		Penyusunan Laporan BMD akhir tahun	Jumlah Buku laporan aset Akhir Tahun	Buku	2paket sebanyak 10 buku	5 buku	3.500.000	4 Buku	4 Buku	2.200.000
		Penyusunan Akuntabilitas Kegiatan Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD	Jumlah Buku Laporan Akuntabilitas Kegiatan Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD	Buku	1 Dokumen Laporan AKIP 2018	10 buku	4.500.000	10 Buku AKIP OPD 2019	10 Buku AKIP OPD 2019	4.000.000
		Survey indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Buku Laporan IKM	Buku	1 dokumen IKM	10 buku	6.000.000	5 Buku	5 Buku	3.550.000
	Persentase PPKS yang mendapatkan Penanganan atau Pelayanan	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial								



										Hibah									
										Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping Program PKH	orang	72376 KPM	72246 KPM	72263 KPM	1.649.512.600	72.263 KPM PKH dan 261 SDM PKH	65.200 KPM PKH dan 261 SDM PKH	1.470.100.000
										Penunjang bantuan APBN untuk Program Bantuan pangan non tunai	Jumlah Pendamping program BPNT	orang	108686 KPM	31 orang	31 Orang	200.570.000	31 SDM BPNT dan 101.263 KPM BPNT di 253 Desa	31 SDM BPNT dan 121.397 KPM BPNT di 253 Desa	136.800.000
										Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persen		100	99,89	1.008.725.000	100	80,00	1.261.200.000



		Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan	orang	22 orang	60 orang	60 orang	36.550.000	110 Orang Terlantar	91 orang	24.200.000
		Kampung Siaga bencana	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelatihan	orang	140 orang	25 orang	25 orang	15.000.000	20 orang	20 orang	4.000.000
		penanganan Pengemis gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan	jumlah Pengemis, Gelandangan dan Orang terlantar yang mendapatkan pelayanan	orang	50 orang	50 orang	40 orang	79.300.000	0	0	77.000.000



	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	29 orang	20 orang	20 orang	45.540.000	6 Orang penyandang disabilitas	6 orang	10.350.000
	Pemberian alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan alat bantu fisik	Orang	78 orang	401 orang	337 orang	341.500.000	0	0	-
	Asistensi Keluarga Orang dengan Disabilitas Berat (AS-KODKB)	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Berat yang mendapatkan Asistensi	Keluarga	5 Keluarga	105 Keluarga	105 Keluarga	86.270.000	2 orang	1	6.800.000



		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persen		100	85,71	21.890.000	0	-	-
		Pembinaan bagi Wanita Tuna Susila	Orang	156 orang	140 orang	120 orang	21.890.000	0	0	-
	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam usaha kesejahteraan	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persen		100	135,18	760.905.000	100	100	1.511.125.000



	Pemberdayaa n Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah TAGANA yang mendapatkan pemberdayaan	Orang	40 orang	50 orang	50 orang	25.000.000	0	0	4.000.000
	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Jumlah Peserta pembinaan Karang Taruna	Orang	100 Orang	90 orang	90 orang	61.125.000	0	0	12.600.000
	Pemutakhiran data terpadu (BDT)	Jumlah operator BDT	Orang	0	0	0	278.450.000	253	253 orang	59.875.000
	Sistem layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah SDM Puskessos yang dibina	Orang	0	100 orang	305 orang	121.750.000	210 fasilitator, 27 supervisor dan 30 puskesos	210 fasilitator, 27 supervisor dan 30 puskesos	1.216.625.000
	Pelayanan Rumah Singgah	Jumlah petugas rumah singgah	Orang	0	0	0	0	32 orang	32 orang	31.400.000
	Program Sosial Kemasyarakatan	Prosentase capaian kegiatan sosial kemasyarakatan	Persen		100	100	25.150.000	0	-	-

	Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris	Jumlah Kegiatan pameran pembangunan dan pawai alegoris	Kali	kegiatan pawai dan pameran	1 kali	1 kali	25.150.000	0	0	-
	Festival Subang Jawara	Jumlah kegiatan Festival	Kali	0	0	0		0	0	-

Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat DaerahDinas Sosial Kabupaten Subang  
Tahun 2021-2022

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		Kondisi Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Kab. Subang					BB (76,01)	8.760.069.588	A (80,50)	8.979.071.328	A (84,00)	9.203.548.111	A (84,00)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kab. Subang					B 83,32	1.062.500	B (84,29)	1.062.500	B (85,6)	1.116.289	B (85,6)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		100	8.331.540.648	100	8.539.829.164	100	8.753.324.893	100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kegiatan		7	40.697.000	7	41.714.425	7	42.757.286	7
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Buku		60	5.397.000	60	5.531.925	60	5.670.223	60

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Buku		60	11.600.000	60	11.890.000	60	12.187.250	60
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Buku		60	10.100.000	60	10.352.500	60	10.611.313	60
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Buku		40	4.400.000	40	4.510.000	40	4.622.750	40
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen	Buku		40	4.400.000	40	4.510.000	40	4.622.750	40
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Buku		15	1.062.500	15	1.089.063	15	1.116.289	15
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Buku		15	3.737.500	15	3.830.938	15	3.926.711	15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		3	6.670.037.478	3	6.836.788.415	3	7.007.708.125	3
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Orang		54	6.661.467.478	54	6.828.004.165	54	6.998.704.269	54
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Buku		7	4.285.000	7	4.392.125	7	4.501.928	7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Buku		7	4.285.000	7	4.392.125	7	4.501.928	7
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Barang Milik Daerah pada PD	Kegiatan		1	8.570.000	1	8.784.250	1	9.003.856	1
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Buku		14	8.570.000	14	8.784.250	14	9.003.856	14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Kegiatan		1	24.950.000	1	25.573.750	1	26.213.094	1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian	Stel		-	-	70	-	70	-	70
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Stel		70	24.950.000	70	25.573.750	70	26.213.094	70
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Umum PD	Kegiatan		8	886.068.970	8	908.220.694	8	930.926.212	8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik	Jenis		8	12.390.000	8	12.699.750	8	13.017.244	8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan ATK	Jenis		49	62.682.370	49	64.249.429	49	65.855.665	49
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jenis		29	14.763.100	29	15.132.178	29	15.510.482	29

--

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	Dus		9.690	258.200.000	8.077	264.655.000	8.100	271.271.375	8.077
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	Jenis		12	31.733.500	12	32.526.838	12	33.340.008	11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat kabar dan Publikasi Media Cetak	Jenis		4	36.660.000	4	37.576.500	4	38.515.913	4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu	dus		3.250	87.325.000	3.250	89.508.125	3.250	91.745.828	3.250
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan		715	382.315.000	715	391.872.875	715	401.669.697	715
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kegiatan		3	260.097.400	3	266.599.835	3	273.264.831	3
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit		-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	Unit		-	-	-	-	5	-	5
Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel	Jenis		6	8.490.000	6	8.702.250	6	8.919.806	6
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis		12	190.740.000	14	195.508.500	14	200.396.213	14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	jenis		6	60.867.400	8	62.389.085	10	63.948.812	4



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kegiatan		2	147.371.700	2	151.055.993	2	154.832.392
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, listrik dan internet	rekening		8	69.371.700	8	71.105.993	8	72.883.642
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan/Keamanan	Orang		9	78.000.000	9	79.950.000	9	81.948.750
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kegiatan		5	293.748.100	5	301.091.803	5	308.619.098
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	unit		17	49.450.000	22	50.686.250	22	51.953.406
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	unit		22	53.900.000	24	55.247.500	24	56.628.688
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Pemeliharaan	Jenis		1	1.000.000	3	1.025.000	6	1.050.625
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan	Jenis		4	15.300.000	5	15.682.500	6	16.074.563

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	m2		1200 m2	174.098.100	1200 m2	178.450.553	1200 m2	182.911.816	1200 m2
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Sesuai Standar	Persen		70,58	429.591.440	82	440.331.226	100	451.339.507	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan TMPN	Kegiatan		3	429.591.440	3	440.331.226	3	451.339.507	3
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Jenis		4	319.729.340	3	327.722.574	3	335.915.638	3
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas TMP	M <sup>2</sup>		8.084	94.922.100	8.084	97.295.153	8.084	99.727.531	8.084
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah petugas Keamanan TMP	Orang		2	14.940.000	2	15.313.500	2	15.696.338	2
	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial				25	412.019.750	35	422.320.244	50	432.878.250	50
	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persen		100	412.019.750	57	422.320.244	36	432.878.250	36,36

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		5	412.019.750	5	422.320.244	5	432.878.250	5
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Orang		257	97.387.250	260	99.821.931	260	102.317.480	260
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Orang		30	169.925.000	30	174.173.125	30	178.527.453	30
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Orang		40	16.585.500	40	17.000.138	40	17.425.141	40
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Orang		40	113.397.000	40	116.231.925	40	119.137.723	40

		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Peserta	keluarga		20	14.725.000	20	15.093.125	20	15.470.453	20
Meningkatnya Penanganan atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		<i>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan/Pelayanan PPKS</i>										
						28,22	4.804.543.150	29	4.924.876.960	30	5.047.998.884	30,24
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (KTK) yang ditangani	Persen	100	8.809.250	100	9.249.713	100	9.480.955	100
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Jenis Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kegiatan		1	8.809.250	1	9.249.712	1	9.480.955	1

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di pulangkan	Orang		6	8.809.250	6	9.249.713	6	9.480.955	6
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen		100	211.680.500	100	216.972.513	100	222.396.825	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kegiatan		9	211.680.500	9	216.972.513	9	222.396.825	9
Penyediaan Permakanan	Jumlah Kelayan yang diberi bantuan permakanan	Orang		40	16.648.000	60	17.064.200	80	17.490.805	80
Penyediaan Sandang	Jumlah kelayan yang diberi bantuan sandang	Orang		48	14.916.000	60	15.288.900	80	15.671.123	80

Penyediaan Alat Bantu	Jumlah kelayan yang diberi bantuan alat bantu	Orang		6	23.167.500	8	23.746.688	10	24.340.355	10
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah kelayan yang direunifikasi	Orang		10	5.375.000	15	5.509.375	20	5.647.109	20
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang		50	18.105.000	100	18.557.625	150	19.021.566	150
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mendapatkan bimbingan Sosial	keluarga		50	13.130.000	65	13.458.250	80	13.794.706	80
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah kelayan yang mendapat fasilitasi pembuatan NIK, Akta lahir, Akta Nikah dan KIA	orang		10	2.580.000	13	2.644.500	15	2.710.613	15
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah kelayan	orang		5	-	8	-	10	-	10
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah kelayan	orang		5	-	-	-	-	-	-
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kelayan terlantar yang dilayani rumah singgah	orang		50	110.851.000	70	113.622.275	100	116.462.832	100

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah kelayan hasil penjangkauan yang diberikan pelayanan penelusuran keluarga	orang		10	6.908.000	15	7.080.700	15	7.257.718	15
Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	Jumlah kelayan Yang di reunifikasi dengan keluarga	orang		40	-	60	-	80	-	80
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah kelayan	orang		40	-	60	-	80	-	80
	Persentase Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan penanganan/pelayanan			28,22	1.419.720.000	3	1.455.213.000	3	1.491.593.325	3
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah jenis kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kegiatan		3	1.419.720.000	3	1.455.213.000	3	1.491.593.325	3
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah kelayan yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	Orang		-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kelayan yang dilayani	Orang		-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Permakanan	Jumlah kelayan yang diberi bantuan	Orang		-	-	-	-	-	-	-





Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah kelayan	Orang		-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah kelayan yang diberikan rujukan	Orang		5.000	1.305.715.000	5.500	1.338.357.875	7.000	1.371.816.822	7.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota	Jumlah kelayan yang dikirim kelembaga dan mitra dalam proses rehabilitasi	Orang		16	22.725.000	20	23.293.125	25	23.875.453	25
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen		50,00	2.108.598.750	60	2.161.313.719	70	2.215.346.562	70,00
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Jenis kegiatan Pemeliharaan Anak terlantar	Kegiatan		3	12.182.500	3	12.487.063	3	12.799.239	3
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau	Orang		40	5.192.500	50	5.322.313	60	5.455.370	60
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Yang dirujuk	Orang		40	567.500	50	581.688	60	596.230	60
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak yang dipantau	Orang		40	6.422.500	50	6.583.063	60	6.747.639	60
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok/Masyarakat yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	kelompok/orang		-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen		100	1.055.734.650	100	1.082.128.016	100	1.109.181.217	100
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana	Kegiatan		5	91.007.500	5	93.282.688	5	95.614.755	5
Penyediaan Makanan	Jumlah Jenis Buffer stock Makanan	Jenis		8	51.793.000	8	53.087.825	8	54.415.021	8
Penyediaan Sandang	Jumlah Jenis Bufferstock sandang	Jenis		7	15.250.000	7	15.631.250	7	16.022.031	7
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Jenis Penyediaan Tempat Penampungan	Jenis		2	16.424.000	3	16.834.600	5	17.255.465	5
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Jenis kelayan Kelompok Rentan yang diberi penanganan khusus	Jenis		5	5.410.000	5	5.545.250	5	5.683.881	3
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Kegiatan Psikososial	Kegiatan		3	2.130.500	3	koordinasi	3	2.238.357	3
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan		2	964.727.150	2	988.845.329	2	1.013.566.462	2

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Peserta	orang		60	26.866.000	100	27.537.650	100	28.226.091	100
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah peserta	Orang		60	937.861.150	100	961.307.679	100	985.340.371	100
	<i>Persentase Penduduk Miskin Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</i>				<i>14,15</i>	<i>232.436.250</i>	<i>14,73</i>	<i>238.247.156</i>	<i>15,36</i>	<i>244.203.335</i>	<i>15,36</i>
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persen		100	232.436.250	100	238.247.156	100	244.203.335	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		2	2.096.416.250	2	2.148.826.656	2	2.202.547.323	2
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang dilakukan update/verval	Jenis		26	232.436.250	26	238.247.156	26	244.203.335	26
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Jenis Data dilakukan verval dan penetapan	Jenis		-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga Yang mendapatkan fasilitas Bansos	kk		13.000	1.863.980.000	14.000	1.910.579.500	15.000	1.958.343.988	15.000

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam bab ini akan disajikan indikator kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Subang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	25	35	50	50
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan/Pelayanan PPKS	91	28,22	29,15	30,24	30,24
3	Persentase Penduduk Miskin Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	9,31	14,15	14,73	15,36	15,36
4	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Kab. Subang		BB (76,01)	A (80,50)	A (84,00)	A (84,00)
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kab. Subang	B	B 83,32	B (84,29)	B (85,6)	B (85,6)

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang ini dirumuskan dan disusun dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhinya.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial kabupaten subang ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta bahan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Subang dari tahun 2018-2023.

Rencana strategis disusun dengan memperhatikan azas fleksibilitas sehingga walaupun terjadi perubahan situasi dan kondisi yang diluar perkiraan dapat dilakukan penyesuaian.

Demikian Rencana Strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial Kabupaten Subang tahun 2018-2023 (perubahan 2021-2023) ini kami susun, semoga bisa direalisasikan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Subang, Aamiin.

Subang,  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Subang,  
  
**Drs. DEDEN HENDRIANA, M.Pd**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19650423 199103 1 006

